

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KEPEL

PERATURAN DESA KEPEL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPEL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepel Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);
31. Peraturan Desa Kepek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPEL
dan
KEPALA DESA KEPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.965.865.522,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.965.865.522,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepel.

Ditetapkan di Kepel
pada tanggal 16 Desember 2024



Diundangkan di Kepel
pada tanggal 17 Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA KEPEL

PERATURAN KEPALA DESA KEPEL
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPEL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kepel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepel Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);
31. Peraturan Desa Kepel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kepel Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Kepel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kepel Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 23.439.000,-
b. Transfer	Rp. 1.937.807.113,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 4.619.409,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.965.865.522,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 762.922.522,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 890.180.920,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 53.893.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 119.949.900,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 138.918.680,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.965.865.522,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

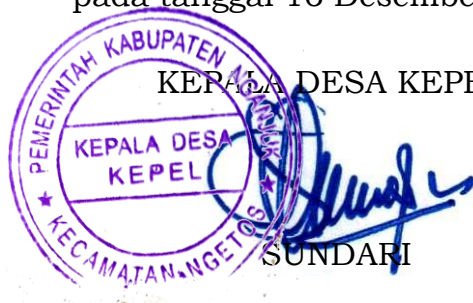
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kepel.

Ditetapkan di Kepel
pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA DESA KEPEL,

SUNDARI

Diundangkan di Kepel
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEPEL,

AIK WULANSARI

BERITA DESA KEPEL TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPEL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.439.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.807.113,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.619.409,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.965.865.522,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	454.540.156,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	814.985.966,00	
5.3.	Belanja Modal	557.420.720,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.918.680,00	
	JUMLAH BELANJA	1.965.865.522,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEPEL, 16 Desember 2024

KEPALA DESA

SUNDARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPEL
TAHUN ANGGARAN 2025

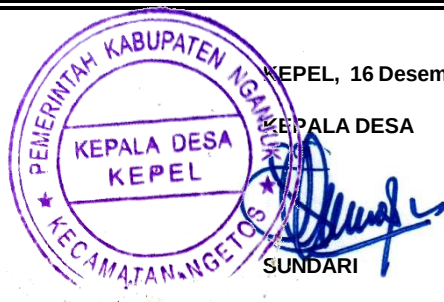
Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.439.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.807.113,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.619.409,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.965.865.522,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>762.922.522,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	648.905.522,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.492.884,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	319.734.084,00	
	1.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.758.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.967.280,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	40.967.280,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	62.450.566,00	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.108.666,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	341.900,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	38.448.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	38.448.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.648.000,00	ADD, PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.648.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.308.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.308.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	34.200.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
	1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.700.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	18.700.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	30.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.606.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.099.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.099.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.507.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.507.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.636.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.787.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.787.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.467.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.467.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.307.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.307.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.050.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.025.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	28.774.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.774.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.774.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>890.180.920,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	141.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	132.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	293.002.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	232.432.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.432.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.895.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.895.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.475.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.668.920,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	245.039.320,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	245.039.320,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	167.629.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	167.629.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.610.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.160.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.450.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	12.450.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.900.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.900.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.893.500,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.440.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.440.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	45.453.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.182.500,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.182.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.271.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.271.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>119.949.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	119.949.900,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	20.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	80.959.900,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	80.959.900,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	18.990.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>138.918.680,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.318.680,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	9.318.680,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.318.680,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.965.865.522,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEPEL, 16 Desember 2024

KEPALA DESA

SUNDARI

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPEL
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			23.439.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			4.739.000,00	
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa			4.739.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			18.700.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			18.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.937.807.113,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.288.786.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.288.786.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			65.328.900,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			65.328.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			583.692.213,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			583.692.213,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.619.409,00	
4.3.6.	Bunga Bank			4.619.409,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			4.619.409,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.965.865.522,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			762.922.522,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			648.905.522,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	BULAN	36.690.792,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			36.690.792,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.690.792,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.690.792,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	BULAN	352.492.884,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			319.734.084,00	
1.01.02.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			319.734.084,00	
1.01.02.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			319.734.084,00	
1.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.758.800,00	
1.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.758.800,00	
1.01.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			32.758.800,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	40.967.280,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			40.967.280,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			40.967.280,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.390.300,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			37.576.980,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12		62.450.566,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.108.666,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.999.257,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.863.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			125.257,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			260.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			91.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.860.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			32.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.189.409,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.020.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2.550.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.619.409,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.520.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.520.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			341.900,00	
1.01.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			341.900,00	
1.01.04.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			341.900,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12		38.448.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			38.448.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			38.448.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			37.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.248.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	12		6.648.000,00	ADD, PAD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.648.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.148.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			378.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.680.000,00	
1.01.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			90.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
1.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12		58.308.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.308.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			51.600.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			51.600.000,00	
1.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.708.000,00	
1.01.07.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.708.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12		34.200.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.200.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			30.000.000,00	
1.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.200.000,00	
1.01.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.90.		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12		18.700.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			18.700.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			8.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			8.500.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			10.200.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			10.200.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			30.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	12		30.000.000,00	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			30.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			30.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			947.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			9.760.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			16.389.400,00	
1.02.03.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.981.000,00	
1.02.03.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			922.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			12.606.500,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12		9.099.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.099.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			699.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			574.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.400.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12		3.507.500,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.507.500,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.057.500,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			560.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			237.500,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.170.000,00	
1.03.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			90.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
1.03.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			42.636.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12		15.787.500,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.787.500,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.087.500,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.235.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			462.500,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.850.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			540.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12		2.700.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)			6.467.000,00	
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.467.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.717.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			312.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			180.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12		6.307.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.307.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.207.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			647.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.825.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			735.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.100.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.100.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			12.050.000,00	
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.050.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.450.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.415.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.150.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.885.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12		2.025.000,00	DDS
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.025.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.025.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.025.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			28.774.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12		28.774.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.774.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.774.000,00	
1.05.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			28.774.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			890.180.920,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			141.000.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12		132.000.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			132.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			132.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			132.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12		9.000.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			293.002.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K'is Bumil, Lamsia, Insentif)	12		232.432.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			232.432.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.032.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			662.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12		1.250.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.120.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			82.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			63.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			144.600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			144.600.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			27.895.000,00	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.895.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.745.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.015.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12		125.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.425.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			180.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.650.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.150.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.500.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			25.475.000,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.475.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.075.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			9.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.400.000,00	
2.02.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.400.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12		7.200.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.200.000,00	
2.02.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			7.200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			412.668.920,00	
2.03.11.		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	12		245.039.320,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			245.039.320,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			245.039.320,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			8.307.800,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			58.243.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			153.837.320,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			20.501.200,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			4.150.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	12		167.629.600,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			167.629.600,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			167.629.600,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			6.742.600,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			30.480.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			124.057.500,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			5.599.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			750.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			20.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12		20.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.000.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.000.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12		1.000.000,00	DDS
2.05.02.	5.3.	Belanja Modal			1.000.000,00	
2.05.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
2.05.02.	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			1.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			14.610.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12		2.160.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.160.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.160.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.160.000,00	
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12		12.450.000,00	DDS
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			12.450.000,00	
2.06.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.450.000,00	
2.06.03.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			12.450.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			7.900.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	12		7.900.000,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.900.000,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.050.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.050.000,00	
2.08.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.08.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.850.000,00	
2.08.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.850.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			53.893.500,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			8.440.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			8.440.000,00	ADD, DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12		8.440.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.240.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			540.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.03.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			45.453.500,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12		5.182.500,00	ADD, DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.182.500,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.982.500,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			205.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			87.500,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			540.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.04.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12		40.271.000,00	ADD, DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.271.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			38.271.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			636.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			37.100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			360.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			119.949.900,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12		119.949.900,00	DDS
4.02.02.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			20.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			20.000.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12		80.959.900,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			80.959.900,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			80.959.900,00	
4.02.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.427.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja			24.275.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material			49.704.600,00	
4.02.04.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Sewa Peralatan			3.103.300,00	
4.02.04.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Administrasi Kegiatan			1.450.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	12		18.990.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.990.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.040.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.450.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			90.000,00	

